

# Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Rachel Atthiyah Najah Kamilah,

Noor Fatimah Mediawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026

# Pendahuluan

- Notaris merupakan pejabat umum yang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian adalah Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ).
- PMPJ diatur secara khusus dalam Permenkumham No. 9/2017 dan merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.
- PMPJ bertujuan mencegah penyalahgunaan jasa Notaris, termasuk tindak pidana pencucian uang.
- Dalam praktik, penerapan PMPJ belum tentu berjalan secara seragam di setiap kantor Notaris.
- SOP diperlukan sebagai edoman kerja agar penerapan PMPJ lebih terstruktur dan konsisten.

# Rumusan Masalah

1. Apakah kantor Notaris di Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ)?
2. Bagaimana keberadaan dan format Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) yang selayaknya dimiliki dan diterapkan oleh kantor Notaris di Kabupaten Sidoarjo?

# Metode

- Jenis penelitian : Penelitian hukum empiris
- Pendekatan : Pendekatan perundang-undangan dan konseptual
- Data primer : Kuesioner kepada 12 Notaris di Kabupaten Sidoarjo
- Data sekunder : UU No. 2/2014, Permenkumham No. 9/2017, Kode Etik Notaris dan literatur atau jurnal hukum terkait.
- Analisis data : kualitatif deskriptif

# Hasil (Penerapan PMPJ)

- 58,3% Notaris telah menerapkan PMPJ
- 41,7% belum menerapkan PMPJ
- Alasan belum menerapkan :
  1. Kurangnya pemahaman
  2. Minimnya sosialisasi
- Penerapan PMPJ di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya merata

# Hasil (Keberadaan SOP PMPJ)

- 50% Notaris telah memiliki SOP tertulis
- 50% lainnya belum memiliki SOP tertulis
- Waktu mulai penerapan SOP tidak seragam
- Terdapat perbedaan pemahaman mengenai SOP tertulis
- SOP yang dimiliki umumnya membantu pelaksanaan PMPJ menjadi lebih terstruktur

# Temuan Penting Penelitian

- Penerapan PMPJ sudah berjalan, tetapi belum merata
- Banyak Notaris mengalami kendala teknis dan administratif
- Penyusunan SOP belum menjadi prioritas di semua kantor
- Tidak semua Notaris memahami SOP tertulis dengan pengertian yang sama
- Tidak semua Notaris memahami SOP tertulis dengan pengertian yang sama
- Keberadaan SOP terbukti membantu penerapan PMPJ lebih konsisten dan sistematis

# Manfaat Penelitian

- Memberikan gambaran faktual mengenai penerapan PMPJ di Kabupaten Sidoarjo
- Menjadi referensi bagi kantor Notaris dalam menyusun SOP PMPJ
- Mendukung peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian
- Memberikan rekomendasi berupa rancangan SOP sebagai pedoman operasional

# Referensi

- [1] R. P. Syafira, H. Purba, Agustining, and Suprayitno, "Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014," *ARBITER J. Ilm. Magister Huk*, vol. 6, no. 1, pp. 156–165, 2024, doi: 10.31289/arbiter.v6i1.3913.
- [2] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia." 2014.
- [3] G. O. S. Robed and I. G. Yusa, "Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasanya Pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017," *J. Interpret. Huk*, vol. 5, no. 2, pp. 994–1002, 2024.
- [4] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Berita Negara Republik Indonesia," no. 1087, 2017.
- [5] N. Umar and T. Haryanti, "Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris di Provinsi Maluku," *Tahkim*, vol. 19, no. 1, pp. 82–95, 2023.
- [6] S. Pardede and Y. A. Mannas, "Pelaksanaan Audit Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris Di Kabupaten Kampar," *Innov. J. Soc. Sci. Res*, vol. 4, no. 1, pp. 3286–3299, 2024.
- [7] Humas Kemenkum Sultra, "Kanwil Kemenkum Sultra Tingkatkan Pelayanan AHU: Notaris Dibantu Atasi Pemblokiran Akun Akibat Tak Isi Kuesioner PMPJ", Kantor Wilayah Kemenkum RI, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- [8] M. W. Wijaya, "Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Video Conference," *J. Rechtsens*, vol. 12, no. 2, pp. 193–208, 2023.
- [9] A. A. Intani and M. Saleh, "Batasan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa ( PMPJ ) oleh Notaris dalam Verifikasi Surat Kuasa Digital," *J. Evid. Law*, vol. 4, no. 2, pp. 875–879, 2025.

# Referensi

- [10] R. Saputra, “Perlindungan Hukum Notaris Atas Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM),” *J. Huk. Caraka Justitia*, vol. 4, no. 2, pp. 123–137, 2024.
- [11] E. Rahman and A. I. Perkasa, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa,” *J. Glob. Indah*, vol. 2, no. 09, pp. 676–692, 2025.
- [12] N. I. M. Syarifudin, “Bentuk Perlindungan dan Pertanggung-jawaban Notaris terhadap Kerahasiaan Isi Akta,” *J. Ris. Ilm.*, vol. 1, no. 11, pp. 1095–1105, 2024.
- [13] “Hasil Kuesioner Penelitian Penerapan PMPJ dan SOP di Kantor Notaris Kabupaten Sidoarjo.” 2026.
- [14] M. C. W. Nanda and M. G. S. K. Resen, “Kelalaian notaris dalam penerapan prinsip mengenal jasa oleh notaris,” *J. Kertha Semaya*, vol. 13, no. 7, pp. 1502–1514, 2025.
- [15] R. Safitra, N. Rahmayani, and A. L. Suryamizon, “Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris,” *Sakata Law J.*, vol. 1, no. 1, pp. 91–98, 2023.
- [16] I. K. D. Kariana, K. W. S. P. P, and N. W. Lasmi, “Optimization of Operational Management in the Notary-PPAT I Putu Setiawan, S.H., M.Kn Kabupaten Gianyar,” *J. Abdimas Gorontalo*, vol. 7, no. 1, pp. 21–27, 2024.
- [17] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML bagi Profesi. 2021.
- [18] Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2010.

